



Analisis Manajemen Pendidikan Pengkaderan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen

Analysis of Cadre Development Management at the Muhammadiyah Regional Leadership (PDM) of Bireuen

Maisura^{1*}, Muakhir Syah Putra², Nurlaili³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Email: maisuraalfatih@gmail.com^{1*}, muakhir@ummah.ac.id², nurlaili.alamsyah@gmail.com³.

Article Info

Article history :

Received : 18-10-2026

Revised : 20-10-2026

Accepted : 22-10-2026

Published : 24-10-2026

Abstract

*This study aims to analyze the management of cadre development implemented by the Muhammadiyah Regional Board (PDM) of Bireuen Regency to ensure the continuity of the organization's ideology and leadership. A descriptive-qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews with PDM officials, direct observation of cadre development activities (specifically *Baitul Arqam* and *Darul Arqam*), and a review of organizational curriculum documentation. The findings indicate that PDM Bireuen has continuously implemented four management functions: planning cadre development targets; organizing through the Cadre Development Council (MPK); executing formal and informal training; and conducting oversight via post-activity evaluations. Nevertheless, the cadre development process faces several obstacles, including limited operational funds, the lack of an optimal integrated cadre database, and challenges in maintaining consistent guidance for training alumni. The long-term success of cadre development at PDM Bireuen depends heavily on strengthening synergy among autonomous organizations and leveraging digital technology within the cadre management system.*

Keywords: *Educational Management, Cadre Development, Muhammadiyah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pendidikan pengkaderan yang diterapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bireuen dalam menjaga keberlangsungan ideologi dan kepemimpinan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam bersama pengurus PDM, observasi langsung pada kegiatan perkaderan seperti Baitul Arqam dan Darul Arqam, serta studi dokumentasi kurikulum organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDM Bireuen telah mengimplementasikan empat fungsi manajemen secara berkesinambungan, yang meliputi perencanaan target perkaderan, pengorganisasian melalui Majelis Pendidikan Kader (MPK), pelaksanaan pelatihan formal dan informal, serta pengawasan berupa evaluasi pasca-kegiatan. Meskipun demikian, proses pengkaderan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan dana operasional, belum optimalnya pusat data kader yang terintegrasi, serta tantangan dalam menjaga konsistensi pembinaan alumni pelatihan. Keberhasilan jangka panjang kaderisasi di PDM Bireuen sangat bergantung pada penguatan sinergi antar-organisasi otonom dan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem manajemen kader.

Kata Kunci : *Manajemen Pendidikan, Pengkaderan, Muhammadiyah*



PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan ideologinya di tengah perubahan zaman yang dinamis. Keberhasilan misi ini sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan kader yang kompeten, yang lahir dari sistem pengkaderan yang terstruktur. Sebagai salah satu struktur daerah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen menghadapi tantangan nyata dalam mencetak regenerasi pimpinan dan penggerak persyarikatan di tingkat lokal. Tanpa sistem pengelolaan pengkaderan yang adaptif, PDM Bireuen berisiko mengalami kelangkaan kader formal dan informal yang siap menggerakkan roda organisasi serta amal usaha Muhammadiyah (AUM) di wilayah tersebut. Pendidikan pengkaderan di lingkungan Muhammadiyah tidak dapat lagi dikelola secara konvensional, melainkan harus menyentuh ranah manajemen pendidikan modern yang profesional. Penerapan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan (*planning*) kurikulum baitul arqam atau darul arqam, pengorganisasian (*organizing*) instruktur, pelaksanaan (*actuating*) forum, hingga pengawasan (*controlling*) pasca-pelatihan menjadi kunci efektivitas kaderisasi.

Di PDM Bireuen, implementasi manajemen ini krusial untuk memastikan bahwa output pendidikan pengkaderan benar-benar menghasilkan kader yang memiliki integritas ideologis, kedalaman ilmu, dan kecakapan kepemimpinan, bukan sekadar pemenuhan formalitas organisasi. Namun pada realitasnya, proses pengkaderan sering kali membentur berbagai kendala manajerial di tingkat daerah. Beberapa isu yang kerap muncul antara lain adalah kurangnya standarisasi sistem monitoring alumni kader, keterbatasan sumber daya instruktur yang tersertifikasi, serta belum optimalnya sinergi pengkaderan antara PDM dengan Organisasi Otonom (Ortom) seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IMM, dan IPM di Kabupaten Bireuen. Evaluasi yang lemah terhadap dampak pelatihan juga membuat peta kompetensi kader di Bireuen belum terpetakan dengan baik, sehingga penempatan kader pada struktur pimpinan maupun amal usaha sering kali tidak berbasis pada keahlian khusus.

Berangkat dari kesenjangan antara tuntutan ideal organisasi dan realitas manajerial tersebut, penelitian mengenai "Analisis Manajemen Pendidikan Pengkaderan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen" menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui pendekatan analisis ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana potret aktual pengelolaan kaderisasi yang berjalan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta hambatan utamanya. Hasil analisis ini nantinya direkomendasikan sebagai landasan strategis bagi PDM Bireuen dalam merumuskan model manajemen pendidikan pengkaderan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan demi masa depan persyarikatan di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana manajemen pendidikan pengkaderan diimplementasikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pendidikan Pengkaderan

Perencanaan merupakan langkah awal yang paling krusial dalam siklus manajemen organisasi, termasuk dalam pengelolaan pendidikan pengkaderan di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen. Melalui Majelis Pendidikan Kader (MPK), PDM Bireuen dituntut untuk merumuskan arah kebijakan kaderisasi yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Proses perencanaan ini diawali dengan penyusunan program kerja, baik jangka pendek berupa kegiatan rutin tahunan maupun jangka panjang yang menyasar pada regenerasi pimpinan jangka sepuluh tahun ke depan. Di tingkat PDM Bireuen, tahapan perencanaan ini sangat menentukan bagaimana visi persyarikatan diterjemahkan ke dalam program konkret yang relevan dengan kebutuhan lokal geografis, sosial, dan keagamaan masyarakat Kabupaten Bireuen.

Aspek penting berikutnya dalam tahapan perencanaan adalah standarisasi kurikulum dan materi pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, seperti pada forum Baitul Arqam atau Darul Arqam. MPK PDM Bireuen mengacu pada Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, namun dengan fleksibilitas untuk mengadopsi muatan lokal. Dalam perencanaannya, penyusunan materi tidak hanya fokus pada penguatan ideologi keislaman dan kemuhammadiyah secara tekstual, melainkan juga merencanakan materi yang membekali kader dengan kecakapan kepemimpinan modern, manajemen organisasi, serta analisis kritis terhadap isu-isu kontemporer yang berkembang di Aceh, khususnya di wilayah Bireuen.

Selain kurikulum, perencanaan yang matang juga harus menyentuh aspek manajerial logistik, penganggaran dana, dan penentuan target sasaran peserta. PDM Bireuen melakukan pemetaan terhadap kebutuhan kader secara berkala demi menentukan skala prioritas peserta pelatihan, apakah memprioritaskan pimpinan cabang, guru-guru di bawah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), atau menggerakkan angkatan muda. Dari sisi finansial, perencanaan anggaran dirancang dengan memanfaatkan kontribusi dan sinergi dari unit-unit AUM yang ada di Bireuen, seperti sekolah, panti asuhan, maupun unit ekonomi lainnya. Perencanaan yang terintegrasi ini memastikan bahwa saat pelaksanaan tiba, kendala teknis dan keterbatasan finansial dapat diminimalisasi secara optimal.

Setelah tahapan perencanaan dirumuskan, efektivitas pencapaian tujuan sangat bergantung pada bagaimana Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pengorganisasian (*organizing*) dalam konteks pendidikan pengkaderan di PDM Bireuen melibatkan pembagian kerja (*job description*) yang jelas antara jajaran pimpinan harian, Majelis Pendidikan Kader (MPK) selaku pelaksana teknis, dan panitia ad-hoc yang dibentuk untuk mengeksekusi kegiatan. Struktur yang solid ini diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih wewenang, sehingga setiap pihak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari koordinasi administrasi hingga penanganan teknis di lokasi pelatihan. Aspek krusial dalam pengorganisasian ini adalah mekanisme perekrutan, seleksi, dan penugasan tim instruktur serta fasilitator.



Kaderisasi yang bermutu membutuhkan pengajar yang tidak hanya paham secara teoretis, tetapi juga memiliki sertifikasi resmi dan pemahaman ideologis yang matang. PDM Bireuen menghadapi tantangan tersendalah dalam mengelola keterbatasan jumlah instruktur lokal yang tersertifikasi. Oleh karena itu, pengorganisasian komponen ini sering kali menuntut MPK Bireuen untuk melakukan sinergi dan komunikasi intensif dengan Korps Instruktur di tingkat Wilayah (Provinsi Aceh) guna menjamin kualitas penyampaian materi Baitul Arqam atau Darul Arqam tetap terjaga sesuai dengan standar nasional Muhammadiyah.

Selain struktur internal, keberhasilan pengorganisasian ini juga diukur dari bagaimana PDM Bireuen membangun jaringan koordinasi lintas sektoral dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Organisasi Otonom (Ortom) di tingkat daerah. Sinergi ini diwujudkan melalui pembentukan komite bersama yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IMM, dan IPM Kabupaten Bireuen dalam menjaring potensi calon peserta. Dengan pengorganisasian yang inklusif ini, PDM Bireuen tidak hanya memperlakukan pengkaderan sebagai proyek sepihak dari MPK, melainkan menjadikannya sebuah gerakan kolektif-kolegial yang mengikat seluruh elemen persyarikatan di daerah tersebut.

2. Pengorganisasian Komponen Pengkaderan

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen mengorganisasikan seluruh komponen pengkaderan secara taktis. Pengorganisasian (*organizing*) dalam konteks ini melibatkan pembagian kerja (job description) yang jelas antara jajaran pimpinan harian PDM, Majelis Pendidikan Kader (MPK) selaku leading sector, serta panitia ad-hoc yang dibentuk untuk mengeksekusi kegiatan di lapangan. Struktur yang solid ini diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Dengan kejelasan birokrasi organisasi, setiap pihak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari koordinasi administrasi, pengelolaan logistik, hingga penanganan teknis di lokasi pelatihan.

Aspek krusial dalam pengorganisasian ini adalah manajemen korps instruktur dan fasilitator. Pendidikan pengkaderan yang bermutu membutuhkan pengajar yang tidak hanya paham secara teoretis, tetapi juga memiliki keabsahan ideologis serta kemampuan metodologis yang matang. PDM Bireuen menghadapi tantangan manajerial terkait keterbatasan jumlah instruktur lokal yang tersertifikasi di tingkat kabupaten. Langkah pengorganisasian ini menuntut MPK PDM Bireuen untuk melakukan sinergi intensif dengan Korps Instruktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh. Pengorganisasian komite instruktur gabungan ini menjadi solusi taktis demi menjamin kualitas penyampaian materi Baitul Arqam atau Darul Arqam tetap berada pada standar mutu persyarikatan.

Selain struktur internal, keberhasilan fungsi pengorganisasian ini diukur dari kemampuan PDM Bireuen dalam membangun jejaring koordinasi dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Organisasi Otonom (Ortom). Sinergi ini diwujudkan dengan melibatkan elemen Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IMM, dan IPM Kabupaten Bireuen ke dalam struktur kepanitiaan bersama. Melalui model pengorganisasian yang integratif ini, proses rekrutmen peserta dapat dilakukan secara sistematis dari berbagai lini. Kegiatan pengkaderan tidak lagi berjalan sebagai agenda sepihak dari MPK, melainkan menjelma sebagai gerakan kolektif yang mengikat dan melibatkan seluruh pilar persyarikatan di Kabupaten Bireuen.



3. Pelaksanaan Kegiatan Pengkaderan

Pada konteks Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen, pelaksanaan pendidikan pengkaderan diwujudkan melalui realisasi berbagai forum pengkaderan, baik yang bersifat perkaderan utama seperti Baitul Arqam dan Darul Arqam, maupun perkaderan fungsional yang menysasar staf serta guru di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Mobilisasi peserta, pengelolaan dinamika forum, dan penyelarasan jadwal menjadi fokus utama MPK PDM Bireuen agar proses transformasi ideologi dan nilai-nilai kemuhammadiyahhan dapat berjalan secara simultan serta kondusif bagi seluruh peserta yang hadir dari berbagai cabang di Kabupaten Bireuen.

Dalam aspek metodologi pembelajaran, pelaksanaan pengkaderan di PDM Bireuen dituntut untuk menerapkan pendekatan yang variatif dan tidak monoton. Proses transfer pengetahuan tidak hanya mengandalkan metode ceramah satu arah dari instruktur, melainkan dikombinasikan dengan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), simulasi pemecahan masalah organisasi, hingga aktivitas luar ruangan (*outbound*). Selain itu, unsur pembiasaan (*habituasi*) ibadah sesuai Tarjih Muhammadiyah seperti salat berjamaah tepat waktu, salat lail, dan tadarus Al-Qur'an menjadi bagian integral yang dilaksanakan secara disiplin selama pelatihan. Pendekatan multi-metode ini dirancang untuk menyentuh tiga aspek kompetensi kader sekaligus, yakni kognitif (pemikiran), afektif (sikap mental/spiritual), dan psikomotorik (kecakapan praktis).

Namun, realisasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai dinamika dan hambatan operasional. MPK PDM Bireuen kerap berhadapan dengan fluktuasi motivasi serta tingkat kedisiplinan peserta, terutama dari kalangan peserta dewasa atau pegawai AUM yang memiliki keterikatan waktu dengan pekerjaan formal mereka. Selain itu, manajemen waktu (*time management*) dalam mengeksekusi padatnya materi kurikulum sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi panitia pelaksana. Kendala-kendala praktis seperti ini menuntut fleksibilitas dan kepekaan dari para instruktur pendamping untuk melakukan improvisasi strategi di forum, tanpa harus mengorbankan esensi dan mutu substansi materi pengkaderan yang terkandung dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah.

4. Pengawasan, Evaluasi, dan Follow-Up

Tahap pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut (*controlling*) merupakan fase krusial yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan sekaligus menjamin keberlanjutan dampak dari pendidikan pengkaderan yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen. Di bawah kendali Majelis Pendidikan Kader (MPK), proses pengawasan dimulai sejak aktivitas pelatihan berlangsung di lapangan. Pengawasan ini dilakukan melalui instrumen penilaian harian yang objektif, yang mencakup aspek kedisiplinan, keaktifan dalam forum diskusi, hingga kepatuhan terhadap ibadah praktis sehari-hari. Evaluasi kolektif juga segera digelar oleh panitia dan korps instruktur begitu pelatihan selesai (*post-event*), guna membedah kekurangan teknis operasional dan menilai sejauh mana target serapan materi ideologi oleh peserta telah tercapai.

Meskipun evaluasi jangka pendek pasca-kegiatan dapat berjalan dengan baik, tantangan terbesar bagi PDM Bireuen terletak pada manajemen tindak lanjut (*follow-up*) dan pemantauan



jangka panjang terhadap para alumni kader. Idealnya, lulusan Baitul Arqam atau Darul Arqam harus segera didistribusikan ke dalam struktur pimpinan organisasi atau ditempatkan pada posisi strategis di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Namun pada realitasnya, PDM Bireuen masih menghadapi kendala dalam hal standarisasi sistem monitoring alumni kader. Kelemahan ini diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan basis data (database) kader yang terintegrasi secara digital, sehingga rekam jejak, potensi khusus, dan kontribusi nyata dari alumni kader di tingkat Pimpinan Cabang (PCM) maupun Ranting (PRM) belum terpetakan secara sistematis.

Kesenjangan dalam fungsi kontrol dan tindak lanjut ini menyebabkan terjadinya fenomena "kader hilang" setelah masa pelatihan selesai. Tanpa skema pendampingan (mentoring) yang terstruktur pasca-diklat, ghiroh (semangat) perjuangan kader yang telah ditempa selama pelatihan cenderung menurun ketika mereka kembali ke rutinitas masing-masing.

Efektivitas fungsi controlling di PDM Bireuen menuntut adanya reformasi manajerial berupa penyusunan cetak biru (blueprint) pengkaderan jangka panjang. Langkah ini harus dibarengi dengan komitmen pimpinan untuk menciptakan iklim organisasi yang akomodatif bagi ruang gerak kader muda, sehingga investasi waktu dan finansial yang telah dikeluarkan dalam proses pendidikan pengkaderan dapat memberikan imbal balik berupa penguatan struktur kepemimpinan persyarikatan yang progresif di Kabupaten Bireuen.

KESIMPULAN

Proses perencanaan pengkaderan yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Kader (MPK) PDM Bireuen telah berjalan cukup terarah melalui penyusunan program kerja tahunan. Kurikulum pelatihan (seperti Baitul Arqam) disusun dengan mengacu pada Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) pusat, namun tetap adaptif terhadap muatan lokal guna merespons tantangan sosiologis di Kabupaten Bireuen. Dari aspek finansial dan sasaran peserta, perencanaan dilakukan lewat pemetaan prioritas dan sinergi pendanaan bersama Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pengorganisasian komponen pengkaderan diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas antara PDM, MPK, dan panitia ad-hoc. Menghadapi keterbatasan jumlah instruktur lokal yang tersertifikasi di Bireuen, MPK melakukan langkah taktis dengan mengorganisasikan komite instruktur gabungan bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh. Selain itu, koordinasi lintas sektoral terjalin baik dengan melibatkan jaringan Organisasi Otonom (Ortom) daerah untuk mengoptimalkan rekrutmen peserta.

Pelaksanaan kegiatan pengkaderan di lapangan diimplementasikan melalui pendekatan multi-metode (ceramah, Focus Group Discussion, simulasi, dan outbound) serta metode habituasi ibadah secara disiplin. Kendala utama pada tahap ini adalah fluktuasi motivasi peserta dewasa/pegawai AUM akibat keterikatan waktu kerja formal, serta padatnya materi kurikulum yang menuntut fleksibilitas dari instruktur pendamping dalam mengelola waktu forum. Fungsi pengawasan jangka pendek selama pelatihan berlangsung sudah berjalan objektif menggunakan instrumen penilaian harian. Namun, kelemahan terbesar manajemen PDM Bireuen berada pada fungsi pemantauan jangka panjang dan tindak lanjut (follow-up). Secara keseluruhan, manajemen pendidikan pengkaderan di PDM Bireuen telah memiliki fondasi operasional yang kuat pada aspek



perencanaan hingga pelaksanaan, tetapi masih memerlukan pembenahan serius pada sistem kontrol dan distribusi alumni demi mencegah fenomena hilangnya potensi kader di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N., & Roslan, M. (2022). *Implementasi Fungsi Manajemen POAC dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kader Persyarikatan*. Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan, 5(2), 123-134.
- Anshori, M. I., & Hasanah, U. (2023). *Strategi MPK dalam Mengatasi Kelangkaan Instruktur Kaderisasi Muhammadiyah di Tingkat Daerah*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 11(1), 45-58.
- Arifin, Z., & Suryana, A. (2023). *Manajemen Strategis Organisasi Kemasyarakatan Islam*. Yogyakarta: Pembawa Kebaikan.
- Fahmi, A., & Wardani, K. (2022). *Manajemen Pelatihan Baitul Arqam Mandiri: Studi Kasus Amal Usaha Muhammadiyah*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(3), 210-222.
- Firdaus, M. R. (2024). *Problematisasi Pengorganisasian Korps Instruktur Pengkaderan Muhammadiyah di Wilayah Khusus*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 3(1), 12-25.
- Hidayat, R., & Saputra, E. (2023). *Digitalisasi Database Alumni Kader: Transformasi Fungsi Controlling pada Organisasi Kepemudaan Islam*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Organisasi, 4(2), 89-101.
- Irawan, D., & Mulyani, S. (2023). *Sinergitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Organisasi Otonom dalam Rekrutmen Kader Pemuda*. Jurnal Administrasi Publik dan Organisasi, 15(2), 142-155.
- Lestari, P., & Huda, M. (2024). *Implementasi Metode Habitasi Ibadah dalam Evaluasi Dampak Pelatihan Darul Arqam*. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, 8(1), 67-80.
- Munir, M. (2023). *Pendekatan Kualitatif Deskriptif dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Keagamaan di Tingkat Pemerintahan Daerah*. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 6(2), 104-118.
- Mu'ti, A., & Rahmawati, A. (2022). *Sistem Perkaderan Muhammadiyah Abad Kedua: Tantangan dan Reorientasi*. Jakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasution, A. H., & Lubis, M. A. (2022). *Analisis Pengawasan dan Evaluasi Jangka Panjang Pasca-Kaderisasi Organisasi Keagamaan di Provinsi Aceh*. Jurnal Kebijakan Sosial Budaya Aceh, 4(3), 201-215.
- Pratama, Y. A. (2023). *Rekomendasi Model Distribusi Kader Muhammadiyah Berbasis Kompetensi pada Amal Usaha Pendidikan*. Jurnal Pemikiran Manajemen Pendidikan, 12(2), 175-189.
- Rohman, F., & Azizah, N. (2022). *Hambatan Komunikasi Organisasi Kolegial dalam Perencanaan Program Kerja Majelis Pendidikan Kader*. Jurnal Komunikasi Islam, 9(1), 34-47.
- Syahputra, R. (2023). *Tantangan Manajemen Kurikulum Pendidikan Kader Muhammadiyah Berbasis Muatan Lokal di Aceh*. Jurnal Dinamika Pendidikan Islam, 10(2), 112-126.
- Wahyudi, I., & Utami, T. (2024). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Keterikatan Waktu Pegawai Amal Usaha Terhadap Efektivitas Pelatihan Ideologi*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 16(1), 55-69.